

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Geografis Wilayah Kabupaten Sumenep

3.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Sumenep

Wilayah Kabupaten Sumenep berada diujung timur Pulau Madura dimana terdapat 27 Kecamatan, 19 Kecamatan daratan dan 8 Kecamatan kepulauan. Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau (sesuai dengan hasil sinkronisasi luas Kabupaten Sumenep Tahun 2002), tersebar membentuk gugusan pulau-pulau baik berpenghuni (48 pulau) maupun tidak berpenghuni (78 pulau). Pulau paling utara adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu dengan jarak ± 151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget, dan pulau yang paling timur adalah Pulau Sakala dengan jarak ± 165 mil laut dari Pelabuhan Kalianget.

Posisi geografis Kabupaten Sumenep terletak diantara $113^{\circ} 32'$ - $116^{\circ} 16'$ Bujur Timur dan $4^{\circ} 55'$ - $7^{\circ} 24'$ Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan	: Selat Madura
Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Barat	: Kabupaten Pamekasan
Sebelah Timur	: Laut Jawa dan Laut Flores

3.1.2 Luas Wilayah

Secara administratif Kabupaten Sumenep termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 wilayah kecamatan, 332

desa/kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 2,093.47 km². Pusat pemerintahan kabupaten berada di Kota Sumenep tepatnya di Kecamatan Kota Sumenep.

3.1.3 Profil Wilayah

Penduduk di Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 mencapai 1.076.805 jiwa, yang terdiri laki-laki sebanyak 512.211 jiwa dan perempuan sebanyak 564.594 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 2.093,47 km², setiap km² ditempati penduduk sebanyak 512 orang pada tahun 2016. Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Kota Sumenep disusul Kecamatan Kalianget.

Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Rasio Jenis Kelamin sebesar 90,6, artinya terdapat sekitar 91 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan.

Sumenep memiliki semboyan "Sumekar", akronim dari "Sumenep Karaton", karena semenjak dahulu wilayah ini terdapat puluhan Keraton/Istana sebagai pusat pemerintahan sang Adipati. Untuk kepentingan pemasaran pariwisata, Sumenep mempunyai *branding wisata* "Sumenep The Heart Purity", julukan tersebut didasarkan pada tingkah pola masyarakatnya yang selalu menjunjung tinggi tata krama serta keramahan kepada setiap tamunya maupun kondisi geografis alamnya yang selalu memberikan keramahan dan kenyamanan bagi setiap wisatawan. Kota Sumenep juga dikenal dengan sebutan Bumi Sumekar, selain itu beberapa pulau di Sumenep juga ada julukannya tersendiri, semisal Kepulauan Kapajang untuk gabungan dari nama Pulau Kangean, Paleat, dan Sepanjang, karena dipulau-pulau inilah taman-taman laut berupa terumbu

karang dan kehidupan laut lainnya berkembang layaknya taman nasional Bunaken^[3]. Selain itu Pulau Kangean juga lebih dikenal dengan sebutan Pulau Cukir, karena di wilayah inilah fauna khas Sumenep berupa Ayam bekisar banyak dikembangkan. Sekarang hewan unggas ini menjadi maskot Sumenep dan juga Provinsi Jawa Timur.

3.2 Gambaran Umum Potensi Wisata

Kabupaten Sumenep banyak meninggalkan jejak-jejak kebudayaan adiluhung yang berkembang luas dikalangan bangsawan Sumenep tempo dulu. Peninggalan-peninggalan kebudayaannya masih bisa dirasakan sampai sekarang oleh para wisatawan, baik budaya tata krama yang tetap dipegang erat oleh masyarakatnya, maupun hasil dari kebudayaan itu sendiri yang berupa bangunan-bangunan megah hasil dari akulturasi beberapa budaya Sumenep dengan beberapa kebudayaan luar yang telah berlangsung sejak abad 18. Beberapa bangunan yang mempunyai nilai arsitektur tinggi dan bersejarah antara lain : yang pertama adalah Museum Keraton Sumenep yaitu merupakan museum yang dikelola oleh pemerintah daerah Sumenep yang didalamnya menyimpan berbagai koleksi benda-benda cagar budaya peninggalan keluarga Karaton Sumenep dan beberapa peninggalan masa kerajaan hindu budha seperti arca Wisnu dan Lingga yang ditemukan di Kecamatan Dungkek, Sumenep. Didalam museum terdapat juga beberapa koleksi pusaka peninggalan Bangsawan Sumenep seperti guci keramik dari Cina dan Kreta My Lord pemberian Kerajaan Inggris kepada Sri Sultan Abdurrahman Pakunataningrat I atas jasanya yang telah banyak membantu Thomas Stamford Raffles salah seorang Gubenur Inggris dalam penelitian yang

dilakukannya di Indonesia. Yang kedua adalah Keraton Sumenep yang merupakan peninggalan pusaka Sumenep yang dibangun oleh Raja/Adipati Sumenep ke 31, Panembahan Sumolo Asirudin Pakunataningrat dan diperluas oleh keturunannya yaitu Sri Sultan Abdurrahman Pakunataningrat I. Karaton Sumenep sendiri letaknya tepat berada di depan Museum Karaton Sumenep. Dalam kawasan Karaton juga terdapat beberapa bangunan cagar budaya seperti: pendapa agung, taman sari, kantor koneng, karaton Gusti Raden Ayu Tirtonegoro R. Rasmana, Kaputren, Karaton Dalem dsb. Yang ketiga adalah Masjid Jamik Sumenep yang merupakan bangunan yang mempunyai arsitektur yang khas, memadukan berbagai kebudayaan menjadi bentuk yang unik dan megah, dibangun oleh Panembahan Somala Asirudin Pakunataningrat yang memerintah pada tahun 1762-1811 M dengan arsitek berkebangsaan tionghoa "law pia ngho". Yang keempat adalah Kota Tua Kalianget letaknya di sebelah timur kota Sumenep, disini para pengunjung bisa melihat peninggalan-peninggalan Pabrik garam, Arsitektur Kolonial dan beberapa daerah pertahanan yang dibangun Oleh Pemerintahan Kolonial saat menjajah wilayah Sumenep. Yang kelima adalah Rumah Adat Tradisional Madura Tanean Lanjhang , bisa ditemui di beberapa daerah menuju pantai lombang maupun menuju pantai slopeng. Yang keenam Benteng VOC Kalimo'ok di Kalianget, yang ketujuh Pantai Gili Labak, dan yang kedelapan Pantai Lombang.

3.3 Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumenep

3.3.1 Visi dan Misi

3.3.1.1 Visi

RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu mendorong perkembangan usaha kerakyatan yang makin mandiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan atau disparitas antara wilayah kepulauan dan wilayah daratan yang sudah maju, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Kabupaten Sumenep juga diharapkan dapat berjalan dengan baik karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicitakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya:

- a. Sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan;
- b. Sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan;
- c. Sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan dan;

d. Sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan. Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan maka Visi pembangunan Kabupaten Sumenep yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah “SUPER MANTAP” Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional” Di dalam visi tersebut terdapat 7 makna kata kunci yaitu : Sumenep Makin Sejahtera, Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional

3.3.1.1.1 Definisi SUPER MANTAP

Sumenep Makin Sejahtera di sini memiliki dua makna. *Pertama*, Sumenep sebagai sebuah wilayah mempunyai potensi sumber daya (*resources*) alam yang melimpah dan kaya khazanah kebudayaan. Apabila SDA yang melimpah seperti migas, pertanian, kelautan, perkebunan dan sektor industri (*home industri*) lainnya dapat dikelola dengan baik dan dimaksimalkan niscaya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan (daya beli) masyarakat Sumenep. Kesejahteraan ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas hidup yang layak, tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia yang meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya ekonomi yang memadai.

Bagi masyarakat Kabupaten Sumenep, persoalan kesejahteraan ini sangat penting, karena jumlah penduduk miskin berkurang, tetapi *trend* terjadinya proses pendalaman dan tekanan kemiskinan cenderung meningkat. Untuk itu, dengan didukung kekayaan sumber daya alam yang terkelola dengan baik, dan ditambah lagi dengan dukungan infrastruktur yang memadai, itu semua niscaya akan dapat dijadikan modal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi, baik di tingkat regional, nasional maupun di tingkat global seiring diberlakukannya kebijakan perdagangan bebas: MEA dan AFTA.

Kedua, Sumenep sebagai sebuah entitas kultural memiliki kekayaan dan keragaman budaya/tradisi yang memiliki muatan nilai-nilai teologis (ke-Tuhanan), kemanusiaan dan sejuta makna (*meaning*) lainnya yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi positif dalam membangun peradaban manusia madura khususnya masyarakat Kabupaten Sumenep, seperti nilai toleransi, gotong royong, kuatnya ikatan persaudaraan di tengah hantaman *glamourisme* dan pengaruh global. Intinya, keragaman budaya Madura dapat dijadikan modal penguatan ikatan dan kohesi sosial masyarakat Madura dalam menghadapi intervensi budaya maupun perkembangan perubahan Masyarakat yang makin kontraktual, konsumtif dan permisif.

3.3.1.1.2 Pemerintahan yang Mandiri

Adalah konsep yang berangkat dari suatu keyakinan bahwa masyarakat Sumenep yang didukung *stakeholders* pada dasarnya mempunyai kemampuan dan potensi swakarsa untuk mengatur dan mengurus proses pembangunan Daerah di Kabupaten Sumenep. Kemandirian di sini bukan berarti tidak menjalin kerjasama

dengan pihak lain, namun pengertian kemandirian di sini difokuskan kepada proses pembangunan berdasar prakarsa/usul/inovasi Masyarakat Sumenep dan direalisasikan oleh Masyarakat dan Pemerintah Daerah Sumenep sendiri. Mandiri adalah kondisi yang tidak tergantung pada pihak lain, tidak ter subordinasi, dan berkembang atas potensi swakarsa untuk menolong dirinya sendiri (*self-help*).

Agamis di sini dalam pengertian bahwa semua proses dan *output* pembangunan di Kabupaten Sumenep tidak semata-mata dikembangkan untuk tujuan meraih kesejahteraan ekonomi, namun harus diimbangi dengan pendekatan spiritual (Agama) untuk membentuk masyarakat Sumenep ber-*akhlaqul karimah*. Dengan kata lain apabila nilai – nilai luhur agama dijadikan modal/*spirit* dalam berkehidupan masyarakat dan pengelolaan pemerintahan, maka di Kabupaten Sumenep akan tercipta masyarakat yang memiliki nilai-moral yang kuat, dan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Nasionalis adalah kesadaran dan sikap politik yang tidak mengedepankan ego kewilayahan dan jati diri masyarakat yang sempit, melainkan sebuah sikap politik yang menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep adalah bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur, dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Transparan atau keterbukaan untuk umum sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good government*). *Good Governance* di sini dimaknai sebagai pengejawantahan nilai-nilai luhur dalam mengarahkan warga negara (*citizen*) kepada masyarakat dan pemerintahan yang berkeadaban melalui wujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya pemerintahan yang bersih adalah sikap di mana para pemegang kekuasaan dan

Masyarakat diatur oleh suatu sistem kehidupan politik dan hukum yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya pemerintahan yang bersih (*clean government*) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggungjawab (*accountable*), yang selalu mampu memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat. Transparansi mutlak diwujudkan sejak proses pembangunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan refleksi, sehingga dengan transparansi tersebut semua proses pembangunan hingga *output* yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak.

Adil adalah ikhtiar politik pembangunan di Sumenep untuk meminimalisir ‘ketimpangan’ distribusi pembangunan antara daratan dan Kepulauan. Keadilan di sini tidaklah bersifat kuantitatif *fifty-fifty*, namun pola distribusi hasil-hasil pembangunan dikembangkan secara proporsional berdasar kebutuhan (*need assesment*) masyarakat, sehingga dengan pola keseimbangan dan keadilan pembangunan, maka antara masyarakat daratan dan kepulauan akan sama-sama dapat merasakan ‘manis’nya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Sumenep.

Profesional bahwa semua proses dan pelaksanaan pembangunan Sumenep dilakukan secara profesional yang mengarah kepada kemampuan *skill* dan sesuai dengan keahlian masing-masing pihak. Penegasan ini penting agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, fokus dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan. Profesional di sini tidaklah berarti mendatangkan ‘orang luar’ (baca; asing) sebagai aktor pembangunan, namun dalam proses pelaksanaannya harus dimaksimalkan peran aktif atau partisipasi masyarakat Sumenep sendiri yang memang mempunyai kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan pembangunan secara swakarsa dan swadaya.

3.3.1.2 MISI

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004, misi adalah upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan **SUPER MANTAP** seperti dimaksud di atas telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

3.3.1.2.1 Misi Pertama

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan. Sumber Daya Manusia merupakan subjek utama dalam pembangunan sehingga Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan produktif menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Dengan SDM yang berkualitas, Kabupaten Sumenep akan melahirkan generasi unggul yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta mampu bersaing di tingkat regional, nasional bahkan di Internasional. Peningkatan kualitas SDM tersebut dilakukan melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Pendidikan dapat dilihat dari peningkatan angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf dan peningkatan angka IPM. Sedangkan peningkatan kualitas kesehatan ditunjukkan dengan peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi langkah strategis dalam rangka

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

3.3.1.2.2 MisiKedua

Mempercepat Pembangunan nfrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan. Ketersediaan dan kemajuan infrastruktur merupakan penunjang utama dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep. Adanya peningkatan infrastruktur dapat mendukung kemajuan di bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan seluruh aksesibilitas kebutuhan masyarakat. Pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga dengan adanya percepatan pembangunan di bidang infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan diantara keduanya yang diikuti oleh pemerataan pembangunan di seluruh sektor. Peningkatan infrastruktur tersebut jugaharusberwawasan lingkungan dengan didukung oleh pengelolaan Sumber Daya Alam secara tepat.

3.3.1.2.3 Misi Ketiga

Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi. Kemandirian ekonomi merupakan kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat untuk mengatur dan mengelola sumber dayadaerahnya sendiri melalui prakarsa, inovasi, dan aspirasi masyarakat serta direalisasikan sendiri oleh

masyarakat Sumenep dalam rangka meningkatkan kemakmuran. Beragamnya potensi ekonomi lokal di Kabupaten Sumenep yang memiliki nilai jual dan berdaya saing tinggi menjadi modal dasar dalam mewujudkan perekonomian Kabupaten Sumenep yang mandiri. Peningkatan kemandirian perekonomian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), berbagai pelatihan bagi wirausaha muda, peningkatan daya tarik investasi, dan pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi di sector pertanian, industri dan perdagangan serta optimalisasi pariwisata daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, melalui pemberdayaan masyarakat pada wilayah-wilayah dengan potensi yang berbeda, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang pada muaranya diharapkan mampu member dukungan pada kesejahteraan masyarakat.

3.3.1.2.4 Misi Keempat

Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan *Accountable*. Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tata pemerintahan yang bersih, tertib dan akuntabel serta menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratisasi, profesionalis medan membuka partisipasi masyarakat. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini ditujukan untuk menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik memerlukan proses dan komitmen

serta sinergi dari seluruh *stakeholder* baik dari aparaturn pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggungjawab. Setiap aparaturn pemerintah harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Di samping itu, pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik menjadi bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan secara profesional, bersih dan akuntabel yang didukung kompetensi SDM yang handal.

Keberhasilan

Pemerintahan yang baik dapat ditunjukkan oleh tidak adanya tindak pidana KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), keberhasilan penegakan hukum dan perundang-undangan, ketersediaan informasi publik, peningkatan indeks kepuasan pelayanan masyarakat, dan peningkatan kinerja birokrasi.

3.3.1.2.5 Misi Kelima

Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta *Stakeholder* Dalam Proses Pembangunan. Kondisi aman dan tertib merupakan harapan masyarakat Kabupaten Sumenep yang ditandai oleh tidak adanya tindakan kriminalitas, terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif dan terlaksananya kebebasan demokrasi yang bertanggung jawab. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan juga dapat menciptakan stabilitas sosial sehingga kelangsungan hidup yang aman dan damai dapat terwujud. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, meningkatkan peran serta

masyarakat dan seluruh *stakeholder* melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), mencukupi ketersediaan petugas perlindungan masyarakat (LinMas), dan menyelesaikan serta mengurangi konflik sosial yang terjadi dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3.3.1.2.6 Misi Keenam

Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten yang kaya kebudayaan dan nilai-nilai agamis. Hal itulah yang menjadikan Kabupaten Sumenep memiliki banyak adat istiadat dan kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan budaya lokal merupakan sebuah potensi pariwisata yang dapat menarik wisatawan baik lokal dan manca negara. Di samping itu, masyarakat Sumenep juga hidup berdampingan dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Sikap toleransi antar umat beragama yang senantiasa terjaga dalam kehidupan bermasyarakat harus terus dikembangkan agar semangat persatuan dan kesatuan menjadi pilar penyangga yang kokoh menuju Kabupaten Sumenep yang maju dan sejahtera. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa juga memiliki peran dan fungsi strategis dalam akselerasi pembangunan dengan berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pemuda harus terus dilakukan salah satunya melalui pemberdayaan potensi kepeloporan pemuda dan olahraga.

3.4 Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Sumenep

3.4.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumenep terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Adapun Program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumenep Tahun 2016 s/d 2021 adalah sebagai berikut : program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin pegawai, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, serta program pelayanan informasi data kepegawaian

3.4.2 Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan

(input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib / belanja langsung di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumenep, ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2016 s/d 2021 sebagai berikut :

3.4.2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program berikut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, penyediaan jasa pelayanan administrasi kepegawaian, serta pameran pembangunan.

3.4.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program berikut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : pengadaan kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional, serta pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor.

3.4.2.3 Program Peningkatan Disiplin Pegawai

Program berikut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, serta pengadaan pakaian olah raga.

3.4.2.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program berikut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja skpd, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, serta penyusunan rencana kerja dan anggaran skpd.

3.4.2.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program berikut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah, pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II bagi pejabat Eselon II PNS daerah, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III bagi PNSD, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV bagi PNSD, peningkatan kinerja aparatur, analisis kebutuhan diklat (AKD), evaluasi dampak diklat (EDD), diklat teknis konseling dan tes HIV, diklat akreditasi puskesmas, diklat penatalaksanaan pelayanan kesehatan gigi, diklat promosi kesehatan, diklat komputer, diklat teknis aparatur sipil negara, diklat fungsional ASN, outbound bagi pejabat aparatur dilingkungan kab. Sumenep, bimbingan teknis penyelesaian kasus-kasus kepegawaian, workshop perubahan mindset dan culture set ASN di Kabupaten Sumenep, diklat teknis manajemen puskesmas dan

rumah sakit, bintek penyelesaian administrasi kenaikan pangkat PNS, diklat akreditasi puskesmas angkatan I, II dan III di Sumenep, penyelenggaraan pekan olahraga anggota korpri, serta fasilitasi pengembangan bakat seni, budaya, mental dan rohani bagi anggota korpri.

3.4.2.6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program berikut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : seleksi penerimaan calon PNS daerah, proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, evaluasi dan pelaporan Baperjakat, penataan administrasi dan monitoring pegawai tidak tetap, proses penyelesaian karis/karsu dan karpeg, proses administrasi pensiun PNS, pelaksanaan sumpah dan janji PNS, proses administrasi pensiun PNS, biaya administrasi diklat pra jabatan, proses administrasi kenaikan pangkat PNS, proses pemberkasan dan penempatan CPNSD, pelantikan pejabat struktural dan fungsional, proses pelaporan LHKPN, proses pengisian dan penyampaian LP2P, proses usulan dan penetapan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya, proses pengangkatan CPNS menjadi PNS, administrasi penerbitan surat ijin belajar dan tugas belajar, biaya administrasi penyerahan tambahan kesejahteraan pegawai negeri sipil, proses peninjauan masa kerja PNS, penyerahan SK pensiun PNS simbolis, pemberian insentif bagi tenaga honorer (eks. k2), uji kompetensi dalam rangka pemetaan jabatan pimpinan tinggi pratama, seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab. Sumenep, penyusunan kebutuhan dan formasi PNS tahun 2017, penyusunan dan penilaian SKP melalui E-SKP, sosialisasi elektronik sasaran kerja pegawai (E-SKP), serta sosialisasi lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) bagi anggota Korpri.

3.4.2.7 Program Pelayanan Informasi Data Kepegawaian

Program berikut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : penyediaan data informasi kepegawaian, validasi data kepegawaian, penyusunan tata naskah kepegawaian elektronik, pembangunan sistem pelayanan kepegawaian terpadu bersertifikasi ISO 9001 : 2008, peningkatan sistem informasi pegawai berbasis web, updating data sistem administrasi pelayanan kepegawaian, penyusunan regulasi kinerja data dan informasi kepegawaian, penyelenggara Sistem Informasi Layanan Harian Kepegawaian (SILAHKAN), klinik layanan informasi BKPSDM (KLIK BKPSDM), penyusunan SIAPA (Sistem Informasi Analisis Profile Pegawai), penyelenggaraan sistem informasi absensi pegawai (SIAGA), serta penyediaan informasi identitas pegawai negeri sipil (PNS).

3.4.3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pentingnya sumber daya manusia di sektor pariwisata adalah manusia (people) merupakan sumber daya yang sangat penting di sebagian besar organisasi. Khususnya di organisasi berbasis jasa (service-based organization), sumber daya manusia (SDM) berperan sebagai faktor kunci dalam mewujudkan keberhasilan kinerja. Sebagai penyelenggara kegiatan kepariwisataan, peranan sumber daya manusia sangat penting. Berdasarkan hasil penelitian dengan Dinas Pariwisata bahwa program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai merupakan satu pintu lewat Badan Kepegawaian Daerah.

Dinas Pariwisata pernah melakukan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai maupun pengelola yang ada dilapangan namun belum sepenuhnya yang bisa mengikuti pelatihan tersebut dikarenakan karena jumlah pegawai yang ada

dilapangan yang banyak sehingga belum menyeluruhnya pendidikan dan pelatihan tersebut. Dan dari beberapa pernyataan pegawai yang mengatakan masih kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diberikan Dinas Pariwisata sehingga kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang professional dalam bidang pariwisata dan berkemampuan tinggi dirasakan sampai saat ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Spillane (dalam Nandi, 2016:4) mengatakan bahwa sumber daya manusia kepariwisataan merupakan salah satu kunci dalam mengembangkan potensi kepariwisataan (kawasan wisata), karena bidang pariwisata memerlukan tenaga kerja terampil yang secara terus menerus harus dikembangkan. Dengan demikian dilihat dari keseluruhan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, hingga saat ini belum berjalan dengan baik, karena proses pendidikan dan pelatihan yang masih sangat kurang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata kepada para pegawai maupun para pengelola yang ada dilapangan sehingga mengakibatkan kurangnya tenaga ahli yang professional dan berkompeten dalam bidang kepariwisataan. Oleh karena itu sangat diperlukan pendidikan dan pelatihan dalam bidang yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumenep.